

BAB V

KESIMPULAN

Kompleks Situs Candi Pulau Sawah merupakan aset budaya Kabupaten Dharmasraya yang terindikasi memiliki afiliasi dengan Kerajaan Melayu Dharmasraya, namun sifatnya secara tak langsung dan butuh kajian mendalam karena hasil temuan yang diperoleh dari Kompleks Situs Candi Pulau Sawah menunjukkan pertanggalan dari abad ke- 8 M dan ke -9 M ketika Pusat Kerajaan Melayu berada di Jambi. Sedangkan Dharmasraya (lokasi Pulau Sawah) di masa Kerajaan Melayu berada pada abad ke- 13 M hingga abad ke- 14 M atau berada di Fase III Melayu sekitar dari abad ke- 11 M - 14 M.

Setelah ditelusur keterkaitannya dengan jejak Kerajaan Melayu di Sumatera, maka Situs Pulau Sawah yang secara geografis berada di satuan unit Kerajaan Melayu Dharmasraya ini mendapat nuansa Hindu-Buddha. Hal itu terbukti dengan temuan arca-arca Hindu dalam timbunan struktur bata yang ada di Kompleks Situs Candi Pulau Sawah. Akan tetapi, dominasi Hindu minim dibanding pengaruh Buddha. Apabila ditinjau dari arsitektur bangunan dan sejumlah tinggalan yang ada di lokasi situs, maka cagar budaya tersebut kaya akan dimensi Buddha. Bila diamati denahnya, terutama pada Candi Pulau Sawah II dan Munggu XI terdapat munggu yang menyerupai asrama (ditaksir tempat belajar para biksu). Secara umum hasil penggalian banyak mendapati tinggalan Buddha yang mencirikan Aliran Tantrayana.

Penelitian ini tidak menafik bahwa Kompleks Situs Candi Pulau Sawah erat dengan penyebaran aliran keagamaan Buddha di Dharmasraya yang diperkirakan masuk sebagai akibat hubungan dengan dunia luar, misalnya dipengaruhi faktor seperti perang (misalnya tak luput dari impresi dan pendudukan Sriwijaya ataupun dampak dari menjadi negara bawahan Majapahit), hubungan persahabatan yang menyimbolkan relasi Jawa-Sumatera (hubungan Singasari-Melayu Dharmasraya) atau faktor dari kegiatan ekonomi (hubungan niaga baik dengan Cina maupun India).

Terungkapnya masa lalu Kompleks Situs Candi Pulau Sawah memang tak bisa dilepas dari konteks Pamalayu. Bila dianalisis dari tata letaknya, Pulau Sawah berada di aliran Sungai Batanghari yang menjadi rute transportasi pasukan Kertanegara. Setelah diamati dari temuan dan bentuk bangunannya yang kental spektrum Buddhisme, Pulau Sawah identik dengan Kerajaan Melayu Dharmasraya yang mendapat pengaruh Buddha dari dunia luar seperti yang diungkapkan tadi.

Kemudian dari temuan keramik di lokasi Situs Pulau Sawah yang identik dengan Cina, sepertinya dibalik hubungan niaga ada misi religi atau pertukaran aliran. Hal itu bisa diamati dari perjalanan I-Tsing yang belajar Buddha ke India dan Cina, namun singgah dan memiliki pengalaman tentang Kerajaan Melayu. Bisa jadi pendeta Buddha tersebut menyebarkan misi Buddha dari Cina dan India ke daerah Kerajaan Melayu atau besar kemungkinan ia belajar aliran tersebut di lokasi Kerajaan Melayu. Data yang ditemukan ia pernah belajar di Percandian Muara Jambi (ketika unit tersebut berada dalam impresi Sriwijaya), tapi tak

menutup kemungkinan pula bahwa lokasi yang di Pulau Sawah merupakan tempat belajar karena letaknya sealiran dengan Situs Muara Jambi. Untuk membuktikan sebenarnya Melayu yang disinggahi I-Tsing Muara Jambi atau Pulau Sawah membutuhkan penelitian yang lebih komprehensif.

Pembeberan fakta dan analisis dari simpulan ini meneguhkan keistimewaan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah yang memiliki keterkaitan dengan sejarah asal-usul Dharmasraya yang tidak dapat dipisahkan dari jejak peradaban yang ada di Padang Roco maupun Rambahan yang kuat hubungannya dengan peradaban Sungai Batanghari dalam hal ini hubungannya dengan Kerajaan Melayu dan pengaruh Buddha. Berdasarkan perspektif itu diketahui antusiasme masyarakat Dharmasraya dan pemerintah setempat dalam menghidupkan kejayaan masa lalu untuk dijadikan identitas yang memotivasi masa kini dalam segala aspek kehidupan berbangsa dan bermasyarakat.

Kekayaan nilai yang terkemuka lewat rangkaian sejarah itu merupakan alasan keterlibatan berbagai *stakeholder* lokal di Kabupaten Dharmasraya, termasuk instansi kebudayaan seperti SPSP Batusangkar, Balar Medan, Puslit Arkenas, Firektorat Kebudayaan dan Pemkab Dharmasraya untuk saling berkolaborasi melestarikan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah dari tahun 1990 hingga tahun 2022. Di antara *stakeholder* tersebut, SPSP Batusangkar (kini BPK III) yang cukup rutin melakukan pelestarian baik kajian maupun aktivitas fisik atau penelitian terapan seperti ekskavasi, pemugaran, pemeliharaan dan sebagainya. Realitasnya instansi tersebut memiliki tujuan serupa dengan

stakeholder lain seperti pemerintah pusat, instansi lintas kemdikbud, pemerintah daerah hingga masyarakat tempatan.

Pelestarian Kompleks Situs Pulau Sawah terealisasi dikarenakan tujuannya amat positif tidak hanya terhadap situs, tapi juga pemerintah/masyarakat daerah dan secara nasional. Objek yang lestari dan terlindungi akhirnya dapat mentransformasikan nilai pengetahuan (sejarah, estetika, arkeologi) dan kekayaan peradaban dari masa lalu. Selain itu menguatkan jati diri masyarakat Dharmasraya sebagai penghuni kabupaten yang berbudaya. Secara konkret kegiatan pelestarian yang berkelanjutan tidak hanya membina relasi, tapi juga mendatangkan keuntungan secara sosial dan ekonomi bagi Pemerintah Kabupaten Dharmasraya umumnya dan masyarakat Siguntur khususnya.

Berdasarkan lokasi Pulau Sawah yang luas dengan kekayaan materi yang belum total digali, maka perburuan data melalui kegiatan pelestarian seperti ekskavasi masih berproses. Kegiatan tersebut memiliki dampak positif, tak hanya bagi bidang pelestarian cagar budaya, tapi juga sebagai wujud promosi Pulau Sawah yang menjadi identitas Dharmasraya atau mensosialisasikan keilmuan arkeologi dan sejarah sehingga beberapa generasi masyarakat tertempat interes membidangi keilmuan tersebut. Pelaksanaan kebijakan pelestarian mampu menumbuhkan *cultural awarness* pada masyarakat tempatan dan pemerintah daerah untuk memberi dukungan dan berpartisipasi atas setiap kegiatan yang mengupayakan pelestarian Kompleks Situs Pulau Sawah.

Eksistensi konstruksi material candi-candi di Pulau Sawah yang masih didominasi keasliannya hingga kini tak hanya menyumbangkan pengetahuan

arkeologi dan menyampaikan pesan dari masa lampau, tetapi juga terdaya dalam menyatukan *stakeholder* terkait dalam sebuah jalinan yang dinamakan “Kolaborasi”. Hanya saja kolaborasi ideal belum konkret terealisasi dalam pengembangan Kompleks Situs Candi Pulau Sawah sebagai ruang wisata edukasi berbasis kearifan lokal. Hal itu diduga oleh faktor kepemilikan lahan yang belum dialihkan kepada negara karena terbentur status tanah ulayat (milik pewaris Kerajaan Siguntur) sehingga aktivitas pelestarian belum berjalan leluasa. Selain itu, terdapat faktor internal yang melanda antar *stakeholder* baik terkait SDM ataupun prioritas penganggaran. Dalam hal ini Kabupaten Dharmasraya sebagai kabupaten muda memiliki prioritas lain dalam merealisasikan pembangunan daerahnya dengan alokasi dana yang tak memungkinkan untuk materi Pulau Sawah yang meruah. Sedangkan bagi SPSP Batusangkar (kini BPK III Sumbar) penganggaran secara totalitas bagi pelestarian Pulau Sawah membutuhkan usaha dengan kerja keras yang lebih ekstra mengingat daftar inventaris cagar budaya di wilayah kerja yang tidak sedikit dan membutuhkan perhatian supaya lestari. Oleh sebab itu, upaya publikasi dan menyampaikan nilai penting Kompleks Situs Candi Pulau Sawah secara nasional terus diupayakan dalam bentuk kolaborasi pemerintah daerah, SPSP Batusangkar (kini BPK III), TACB daerah dan TACBN supaya objek tersebut menjadi fokus nasional. Harapannya pusat dapat berkontribusi mengatasi kendala pelestarian dalam bentuk pengembangan Pulau Sawah, khususnya mensupport pelaksana kebijakan di daerah untuk mendapati kepercayaan pemilik lahan untuk memercayakan pengelolaan situs di bawah tata kelola pemerintah. Hingga kini hal tersebut masih berlangsung.